



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANANG FATCHUROCHMAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 962063

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 481 m2/250 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/85 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/100 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , Rp. 1.500.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 1.300.000.000		
6. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	350.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.610.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	146.687.639



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 5.625.297.639

III. HUTANG

Rp. 900.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.725.297.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.